

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan adalah terwujud melalui transparansi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan terhadap masyarakat. Mengingat bahwa lembaga ini adalah lembaga penegak hukum yang menangani kasus-kasus korupsi telah mampu mengejawantahkan Undang-Undang dalam penegakan hukum dalam setiap proses mobilitas kinerja di Pengadilan ini. Sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas bagaimana pengaplikasian Undang-Undang No.20 tahun 2001 ini di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam persidangan di Pengadilan, Hakim sebagai pemberi sanksi sudah memperlakukan semua orang itu adalah sama di hadapan hukum tanpa membedakan faktor apapun sebab semua orang adalah sama di depan hukum. Hakim juga sudah bertindak berdasarkan hukum dan sikap professional dalam memutuskan perkara korupsi. Dalam menyelesaikan berbagai perkara korupsi, Hakim tidak pernah mencampur adukkan perkara dengan adanya unsur kekeluargaan atau unsur-unsur kedekatan lainnya. Hal ini terlihat dari sikap professional seorang Hakim dalam

menindak sebuah perkara dan mampu menyelesaikannya dengan baik tanpa kekurangan apapun. Tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang tidak sesuai dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan seorang Hakim kepada pelaku korupsi. Hal ini ditegaskan kembali oleh responden bahwa seorang Hakim tidak dapat mengatakan bahwa ada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang tidak sesuai atau tidak cocok karena pada dasarnya setiap Undang-Undang yang diberlakukan oleh pemerintah harus dijalankan oleh pelaksana atau penegak hukum yang bersangkutan. Sehingga Hakim harus bekerja sesuai dengan aturan Undang-Undang yang mengaturnya. Maka akan terwujud implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan.

B. Saran

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang bekerja sesuai aturan hukum diharapkan terus meningkatkan peran dan tugasnya sebagai badan penegak hukum yang mandiri dan mampu menjaga integritas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan Pengadilan ini mampu tegas dan berwibawa dalam menindak kasus-kasus korupsi sehingga secara tidak langsung hal ini telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Penegakan hukum melalui Pengadilan ini adalah salah satu jalan menuju Indonesia bersih dari korupsi. Diharapkan juga masyarakat mampu mendukung segala program kerja yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Medan serta mampu kritis terhadap program yang tidak mendukung penegakan hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan harus mengimplementasikan Undang-Undang yang mengaturnya dalam memberikan sanksi. Supaya setiap sanksi yang dijatuhkan kepada setiap pelaku korupsi dapat diterima dengan adil. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang antara pelaku dan pemberi sanksi dalam menegakkan pemberantasan korupsi melalui lembaga penegak hukum khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan.